

EKSISTENSI ISTIHSAN SEBAGAI DALIL ISTINBATH FIQH SIYASAH

Henderi Kusmidi

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jalan Raden Fattah Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu
Pos-el: Henderi.kusmidi@iainbengkulu.ac.id

Abstract: This study aims to comprehensively describe the existence of istihsan in siyasa fiqh. There are some scholars who reject the existence of istihsan as one of the methods of istinbathul ahkam, this group believes that the use of istihsan in istinbathul ahkam is not valid, especially in matters of fiqh siyasah. The reason for this refusal is based on the concern that the door of ijtihad will be opened based on mere lust. This happens because the istihsan method is not yet clearly standardized for its implementation. However, what actually happened in the field was not like that. Based on the research that the author did, it was found a conclusion that istihsan really exists and exists in the world of istinbathul ahkam explicitly and exists in siyasah fiqh implicitly. This happens because istihsan is responsive to the problems of social life, as well as progressive, in harmony and in line with the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad.

Keywords: Dalil, Fiqh Siyasah, Istihsan.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif eksistensi istihsan dalam fiqh siyasah. Ada sebagian ulama yang menolak keberadaan istihsan sebagai salah satu metode istinbathul ahkam, golongan ini beranggapan bahwa penggunaan istihsan dalam istinbathul ahkam tidak sah, lebih-lebih dalam persoalan fiqh siyasah. Alasan penolakan ini didasarkan pada kekawatiran akan terbukanya pintu ijtihad yang dilandaskan oleh hawa nafsu semata. Hal ini terjadi karena metode istihsan belum jelas setandar pelaksanaannya. Padahal yang terjadi sebenarnya dilapangan tidak seperti itu. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan sebuah kesimpulan bahwa istihsan benar benar ada dan eksist dalam dunia istinbathul ahkam secara eksplisit dan eksist dalam fiqh siyasah secara implisit. Hal ini terjadi karena istihsan bersifat responsif terhadap problematika kehidupan sosial, serta progresif, selaras dan seiring dengan al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW,.

Kata kunci: Dalil, Fiqh Siyasah, Istihsan.

Pendahuluan

Islam adalah agama pemungkas, sempurna, dan cocok untuk berbagai kondisi, kapan dan dimana saja, Islam diyakini mampu memberikan pemecahan-pemecahan masalah yang dihadapi umatnya sepanjang zaman. Islam adalah agama universal, kompleks dan berlaku sepanjang zaman. Seiring dengan sifat-sifat tersebut, agama Islam memiliki hukum-hukum yang kompleks pula.

Islam berbagai hukum yang mengatur segala urusan yang tidak hanya ukhrawi juga mengatur keduniawian yang fleksibel dan selalu relevan di zaman sekarang. Dan konsekuensi itu kerelevanan Islam yaitu hukum Islam tidak pernah stagnan dan berkembangnya hukum Islam disetiap waktu untuk menjawab berbagai permasalahan hukum kontemporer yang sangat memerlukan solusi hukum Islam yang jelas dan tegas. Sehingga tidak menimbulkan kegoncangan dan kebingungan di tengah masyarakat.

Salah satu cara ulama' untuk melakukan hal itu yaitu dengan cara berijtihad. Dan salah satu contoh ijtihad ulama' adalah istihsan. Dan didalam tulisan ini, penulis mencoba menjelaskan tentang maksud dari istihsan, macam-macamnya, kekuatannya dalam ijtihad, serta kerelevanannya dimasa kini dan mendatang. Dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami salah satu

bagian dari ijtihad, serta mempersempit kekeliruan masyarakat dalam memahami dan menanggapi berbagai permasalahan.

Istihsan adalah salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama', meskipun dalam kenyataannya semua ulama' menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya para ulama' menggunakan istihsan dalam arti lughawi yaitu berbuat sesuatu yang lebih baik. Tetapi dalam pengertian istilah yang biasa berlaku, para ulama' berbeda pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefenisikan Istihsan.¹

Ulama' yang menggunakan metode istihsan dalam berijtihad mendefenisikan istihsan dengan pengertian yang berlainan dengan defenisi dari orang yang menolak cara istihsan. Sebaliknya ulama' yang menolak penggunaan istihsan mendefenisikan istihsan dengan pengertian tidak seperti yang didefenisikan pihak yang menggunakannya. Seandainya mereka sepakat dalam mengartikan istihsan, maka mereka tidak akan berbeda pendapat dalam menggunakannya sebagai sebuah metode ijtihad.

Pada hakekatnya istihsan digunakan untuk mendapatkan kemashlatan dan menolak kemadharatan atau dengan kata lain digunakan untuk menemukan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemadlaratan yang lebih sedikit, sehingga istihsan bisa dikatakan

¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2009, h. 324

untuk digunakan sebagai sumber dan metode hukum Islam. Sebab istihsan ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap nash-nash syara' yang menunjukkan bahwa Allah SWT Yang Maha Bijaksana berpindah dari sebagian kasus-kasus yang bisa digunakan dengan Qiyas (umumnya nash) kepada hukum lain yang memberikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kemadlaratan). Istihsan bisa juga dikatakan sebagai dalil syara', akan tetapi bukan dalil yang mustaqil, namun demikian ia harus kembali kepada dalil syara' yang lain sebab setelah diteliti tujuan pokok istihsan itu tetap kembali kepada mencari kemaslahatan dan menolak kemadlaratan.

Pembahasan

a) Pengertian Istihsan

Secara etimologis/lughawi istihsan berarti memperhitungan sesuatu lebih baik atau adanya sesuatu itu lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang suruh untuk itu.²

Menurut bahasa istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama' ushul fiqh adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya pada peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syari'at. Jadi istihsan adalah tindakan meninggalkan

suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syari'at yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Misalnya yang paling sering dikemukakan adalah peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri di zaman khalifah Umar bin Khattab. Pada hal seharusnya pencuri dipotong tangannya. Itu adalah hukum asal, namun kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum lainnya, berupa tidak memotong tangan pencuri. Ini adalah hukum berikutnya dengan suatu dalil tertentu yang menguatkannya.³ Pengertian istihsan dalam pandangan ulama' antara lain :

- 1) Menurut Ibnu Arabi, istihsan adalah :

ترك الدليل والترخيص بمخالفته
لمعارضته دليل آخر في بعض
مقتضياته

*"Meninggalkan kehendak dalil dengan cara pengecualian dan memberikan rukhsah karena berbeda hukumnya dalam beberapa hal."*⁴

- 2) Menurut Imam al-Syatibi, istihsan adalah :

الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة
دليل كلي

³ Imam Asy Syafi'i, Penerjemah Masturi & Asmuni Taman, *Ar Risalah Panduan Lengkap Fiqh dan Ushul Fiqh*, Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2019, h. 396

⁴ Al Syatibi, *al I'tisham*, Libanon, Dar Al Maktabat al Ilmiyah, 1995 M/1415 H Juz. 2 h. 371

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 325

"Pengambilan suatu kemaslahatan yang bersifat juz'i dalam menanggapi dalil yang bersifat global.⁵

- 3) Menurut Ibnu Rusyd, istihsan adalah :

طرق لقياس يؤدى الى غلو في الحكم و
مبلغة فيه فعدول عنه فى بعض الموضع
لمعنى يؤثر فى الحكم يختص به ذلك الموضع

"Membuang qiyas yang membawa kepada kelebihan-kelebihan dalam hukum dan dipindahkan pada sisi lain karena adanya makna yang mempengaruhi hukum pada tuntutan hukum yang khusus bagi posisi tersebut".

- 4) Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan istihsan sebagai:

عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي
إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم
كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقح فى
اعقله رجح لديه هذا العدول.

"Berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali (nyata) kepada tuntutan qiyas Khafi (samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum yang sifatnya istisna'i (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut,⁶

- 5) Istihsan menurut Imam Maliki dan pengikutnya

Menurut Imam Malik istihsan adalah:

العمل بأقوى الدليلين ، أو الأخذ بمصلحة جزئية فى مقابلة دليل كلي. فهو إذن تقديم الاستدلال المرسل على القياس

"Beramal dengan dalil yang terkuat di antara dua dalil, atau menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli.⁷"

b) Dasar Hukum Istihsan

Jumlah dalil-dalil syara' (sumber-sumber hukum) itu banyak, dari jumlah yang banyak itu ada yang telah disepakati oleh para ulama' ushul fiqh dan ada pula sebagian yang belum mereka sepakati. Adapun dali-dalil yang disepakati adalah, Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Sebagaimana halnya mereka telah sepakat bahwa dalil-dalil-dalil tersebut adalah sebagai alat istidlal (menetapkan dalil suatu persitiwa) juga telah sepakat tentang tertib jenjang dalam beristidlal dari dalil-dalil tersebut.⁸ Sebagai bukti keharusan beristidlal dengan 4 macam dalil tersebut antara lain firman Allah SWT dalam surat Annisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

⁵ Ibnu Ishaq al-Syatibi, *Al Muwafaqat Ushul al-Syari'ah*, Beirut; Dar Al-Kutub, tth Jilid 4, h. 148-149

⁶ Abdul Wahab Khalaf, "Ilmu Ushul al-fikih (Kairo: Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, 1991), cet. VIII, h. 79

⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), Jilid. II, cet. 14, h. 19.

⁸ Mukhtar Yahya, Fatrchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Penerbit PT. Al-Ma'arif Bandung. Tahun 1986, h. 28

وَالرَّسُولَ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Selanjutnya sebagai dasar hukum keharusan menertibkan jenjang dalam bersitidlal dengan 4 macam dalil hukum diatas adalah wawancara Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal sesaat dilantik sebagai penguasa untuk negeri Yaman. Beliau berkata :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي
عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ
بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ مِنْ
أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى
الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ
قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ
لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ
اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ « فَإِنْ لَمْ
تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي
وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ
رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضَى رَسُولَ اللَّهِ

“Dari Muadz: Bahwasanya Rasulullah saw ketika mengutus Muadz

ke Yaman, beliau bersabda: “Bagaimana kamu memutuskan jika dihadapkan perkara kepadamu ‘ Muadz menjawab: “Saya putuskan dengan kitab Allah. Rasulullah bertanya kembali: “Jika tidak kau temukan dalam kitab Allah.” Muadz menjawab: “Saya putuskan dengan sunah Rasulullah saw. Rasulullah bertanya: Jika tidak kau temukan dalam sunah Rasulullah ‘ Muadz menjawab: “Saya berijtihad dengan ra’yu saya dan tidak melampaui batas.” Muadz lalu berkata: “Rasulullah menepukan tangannya ke dada saya dan bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk utusan Rasulullah terhadap apa yang diridloi Rasulullah.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan At Turmudzy)

Para ulama yang menerima Istihsan sebagai dalil hukum, mereka mengembalikan dasar Istihsan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Adapun dalil yang berasal dari al-Qur’an antara lain :

a. Al-Qur’an Surat Az Zumar ayat 17-18

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا
وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ
الْأُولَاءُ

Artinya : dan orang-orang yang menjauhi tagut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.

b. Al-Qur'an Surat Al A'raf : Ayat 145

وَكُنْتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا
لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا
بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

Artinya: Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu; maka (Kami berfirman): "Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya, nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik

c. Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

d. Dalil yang berasal dari as-Sunnah antara lain :

Artinya: "Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah" (HR. Ahmad Ibn Hanbal).

Di samping kedua dalil hukum di atas, Ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasannya mengambil dalil dengan istihsan itu hanyalah istidlal dengan qiyas khafi yang menang atas qiyas jalli atau kemampuan qiyas atas qiyas lain yang melawannya dengan dalil yang menuntut kemenangan itu atau juga Istidlal dengan Mashlahah Mursalah (kepentingan umum) atas pengecualian

bagian hukum kulli, semua itu merupakan istidlal yang sah (benar).⁹

c) **Kehujjahan Istihsan**

Terdapat perbedaan pendapat ulama ushul al-fiqh dalam menetapkan istihsan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', ada yang menerima untuk dijadikan hujjah dan ada pula yang menolak, antara lain :

1. Kelompok yang memakai istihsan sebagai hujjah

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Imam Maliki, Hanafi, dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Maliki menerima istihsan, karena pada dasarnya mazhab Maliki sangat memperhatikan kaidah-kaidah umum dan ini harus qath'i. Untuk sampai kepada hal ini, harus melalui induksi.¹⁰ Seperti menjamak sholat isya dan magrib karena ada kesukaran atau sedang dalam perjalanan. Begitu pula melihat aurat lawan jenis dalam rangka pengobatan.

Husain Hamid menjelaskan, bahwa dasar pemakaian istihsan bagi mazhab Maliki sebagai berikut:

a. Kaedah istihsan merupakan kaedah yang diambil dari nas-nas syara' dengan cara induksi yang

⁹Acep Djazuli dan I. Nurol Aen, Ushul Fiqh (Bandung: Gilang Aditya Press, 1997), h. 133

¹⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usûl al-Syari'ah*, Juz 4, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, t.th.) h. 35 dan 87

memberi faedah qath'i bukan akal dan mengikuti hawa nafsu.

b. Dengan kaedah istihsan mujtahid kembali kepada dalil syara' yang juga diambil dari induksi nas-nas syariat.¹¹

Mazhab Hanafi juga memberi penjelasan tentang istihsan yang tidak jauh berbeda dengan mazhab Maliki. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa istihsan merupakan salah satu upaya ulama mujtahid untuk mencari jalan keluar dari kaedah umum atau qiyas pada suatu masalah yang sifatnya cabang (juz'i).

Dasar pertimbangan dalam memakai istihsan adalah terealisasinya dan terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan umat, sebagaimana tujuan syariat. Menurut Abd al-Wahab Khallaf, tujuan syaria adalah tercapainya kemaslahatan-kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹²

Ulama'-ulama' yang berpegang kepada istihsan sebagai sumber hukum, yang kebanyakan mereka adalah fuqaha' fuqaha aliran Hanafiyah, dengan alasan bahwa beristidlal dengan istihsan sebenarnya adalah beristidlal

dengan qiyas khafi dengan mengalahkan qiyas jali atau mentarjihkan suatu qiyas yang menentang dengan suatu dalil yang dapat dipakai untuk mentarjihkan atau beristidlal dengan masalah mursalah untuk mengecualikan suatu hukum dari dalil kulli. Masing-masing istidlal yang disebutkan adalah istidlal yang shahih.¹³

Berdasarkan definisi dan macam-macam istihsan, dapat diketahui bahwa istihsan itu pada dasarnya bukan merupakan sumber pembentukan hukum yang berdiri sendiri. Yang menggunakan hujjah istihsan ini adalah kebanyakan dari ulama' hanafiyah. Alasan mereka terhadap dipakainya istihsan sebagai hujjah adalah bahwa istidlal dengan jalan istihsan hanya merupakan istidlal dengan qiyas khafi yang dimenangkan atau diutamakan dari qiyas jali atau merupakan kemenangan qiyas terhadap qiyas lainnya yang berlawanan dengan dalil yang menuntut adanya kemenangan atau merupakan istidlal dengan jalan masalah mursalah terhadap pengecualian hukum kulli dan semua itu merupakan istidlal yang benar.¹⁴

¹¹ Hasan Hamid Hasan, *Nasabiyah al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islamiyah* (Mesir: Dâr alMaktabat al-Arabiyyah, t.th.), h 258-259

¹² Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Kairo: Maktabat Da'wah al-Islamiyah, 1986), h. 256

¹³ Mukhtar Yahya, Fatrchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, h. 104

¹⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Penerbit Risalah Bandung, 1985, h. 122

2. Kelompok Yang Menolak Kehujjahan Istihsan

Mazhab Syafi'i menolak memakai Istihsan, karena menurutnya, menggunakan istihsan berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu, sehingga dipandang keluar dari bantuan syarak. Hal ini tidak sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Qiyamah (75): ayat : 36

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يُمْنَىٰ

Artinya : Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)

Mazhab Syafi'i menjelaskan, bahwa kata sudan dalam ayat di atas, adalah sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Siapa yang berfatwa atau menetapkan hukum dengan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, berarti ia telah membiarkan dirinya kedalam kategori sudan. Padahal Allah melarang orang untuk berbuat sia-sia, tanpa pertanggungjawaban.¹⁵

Lebih lanjut, mazhab Syafi'i mengatakan, bahwa Rasulullah saw. tidak pernah mengeluarkan fatwanya berdasarkan hawa nafsu dan juga tidak menetapkan sesuatu masalah agama berdasarkan istihsan, tetapi dia mengikuti wahyu. Dengan demikian,

apabila suatu masalah tidak ada ketentuannya dalam Alquran dan Sunnah, maka mazhab Syafi'i memakai qiyas, bukan istihsan. Mereka hanya melihat istihsan sebagai dasar dari keinginan seseorang, sebab sekalipun orang itu tidak mengetahui kaidah usul, ia tetap bisa melakukan istihsan. Dalam proses istinbath hukum, Istihsan tidak mempunyai batasan yang jelas, tidak pula memiliki kriteria yang bisa dijadikan standar untuk membedakan antara yang benar dan yang salah.¹⁶

Imam Syafi'i mencontohkan, jika hakim atau mufti memutuskan suatu hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dengan berdasarkan pendapat pribadi (istihsan), maka tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang menentang pendapatnya dengan dalih yang sama (istihsan). Sehingga setiap hakim atau mufti di suatu negara akan mengemukakan pendapat pribadinya yang dianggap baik (istihsan). Akibatnya, satu masalah bisa saja mempunyai berbagai macam pandangan hukum dan fatwa. Meskipun perbedaan pendapat itu diperbolehkan, tetapi kalau pendapatnya hanya berdasarkan pendapat pribadi (istihsan), maka akan timbul kekacauan, karena setiap orang

¹⁵ Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
163

¹⁶ Muhammad Abu Zahra, *Usûl al-Fiqh* (Kairo : Dâr al-Fikr al-Arabi, t.th.), h. 412-415

bebas berpendapat.¹⁷Demikian, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i untuk meruntuhkan konsep istihsan.

d) Pandangan Ulama Mazhab tentang Istihsan

Abu Hanifah adalah ulama yang banyak menetapkan hukum dengan istihsan tetapi tidak pernah menjelaskan bagaimana maksud daripada istihsan itu. Ketika menetapkan suatu hukum dengan cara istihsan, Abu Hanifah mengatakan : “Astahsin”, artinya saya menganggap baik. Penetapan hukum dengan cara Istihsan ini diikuti oleh murid-muridnya sehingga golongan Hanafiah dikenal sebagai golongan yang menilai Istihsan sebagai salah satu metode istinbath hukum.¹⁸Istihsan adalah sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan istinbath hukum oleh dua Imam Mazhab yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang istihsan tersebut didapat gambaran akan ragamnya pemaknaan yang diberikan oleh para ulama tersebut. Meskipun demikian, definisi yang

dikemukakan Imam Abu al-Hasan al-Kharkhi, dalam pandangan Abu Zahrah, adalah yang paling merepresentatif dalam menjelaskan hakikat istihsan dalam pandangan Mazhab Hanafi. Karena definisi tersebut tidak sekedar memberikan pengertian tentang Istihsan dalam artian yang sempit tetapi juga mencakup semua macam definisi Istihsan serta dapat menyentuh pada azas dan inti pengertiannya. Al-Kharkhi mendefinisikan Istihsan sebagai penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketentuan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.¹⁹

Al-Sarakhsi, ulama terkemuka dari golongan Hanafi, menyatakan bahwa Istihsan pada hakikatnya ada dua macam qiyas, pertama qiyas jali, tetapi lemah dalam pencapaian tujuan syari'at, yang dinamakan kias. Kedua, qiyas khafi yang lebih diutamakan dari qiyas jali karena memiliki pengaruh yang lebih kuat. Artinya mendahulukan dan mengutamakan Istihsan daripada kias dan berdasarkan pada pengaruh

¹⁷ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Cet. I; Bandung: Mizan Media Utama, 2008), h. 363.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa 'Ashruh Ara'uh wa Fiqhuh*, (t.t.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1366H/1974H), h. 342

¹⁹ Abu Zahrah, *ibid.* Lihat pula Manna' al-Qattan, *op.cit.*, 268; Muhammad Sulaiman 'Abdullah al-Asyraf, *al-wadhih Fi Ushul al-Fiqh Lil Muftadiin*, (Amman: Dar al-Nafais), 1412H/1992 M), h. 140

hukum, bukan terletak pada bentuk qiyas jali dan qiyas khafi-nya.²⁰

Dalam fikih Hanafi, istihsan dibagi dalam empat macam, yaitu Istihsan dengan nash, istihsan dengan ijma', Istihsan dengan dharurat, dan Istihsan dengan qiyas khafi.²¹ Tetapi ada beberapa ulama yang menyebutkan Istihsan dengan mashlahat, dan Istihsan dengan 'urf adalah juga merupakan bagian dari istihsan. Diantara mereka ada menyimpulkan bahwa pembagian dua Istihsan terakhir ini adalah bersumber dari masalah-masalah yang diriwayatkan golongan Hanafiah, walaupun dalam kitab ushul fiqh tidak pernah ada pembahasan mengenai hal itu.²² Para faqih yang menggolongkan dua bentuk istihsan terakhir tersebut berasal dari golongan Hanafiah, tampaknya, mendasarkan pandangannya pada asumsi bahwa Imam Hanafi lebih memilih Istihsan dibanding menggunakan qiyas.

Dilain pihak, Imam Malik berpendapat seperti yang diungkapkan al-Syatibi, bahwa Istihsan berdasarkan pada teori mengutamakan realitas

tujuan syari'at. Artinya mereka yang berdasarkan istinbath hukum berdasarkan Istihsan adalah bertujuan untuk menerapkan dalil-dalil yang umum. Metode ini juga dipergunakan dalam rangka memperhatikan tujuan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kesukaran dalam penerapan dalil umum tersebut, karena setiap dalil itu dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menolak kerusakan-kerusakan yang mencari pesan inti dari Syari'ah yang diturunkan oleh Allah.²³

e) Eksistensi Istihsan Dalam Istinbathul Ahkam Fiqh Siyasah.

Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.²⁴

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah

²⁰ Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz X, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adat, 1321H), h. 145; Lihat pula, Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: LSIK, 1994), h. 44

²¹ Al-Taftazani, *Ayarah al-Ta'wil 'Ala Tadwin*, II, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, t.th.), h. 82

²² Abdul 'aziz Ibn 'Abdurrahman Ibn Ali al-Rabi'ah, *Adillat al-Tasyri' al-Mukhtalaf Fi al-Ihtijaj*, (t.t., Mu'assasat al-Risalah, Cet. I., 1399H/1979M), h. 165-166

²³ Lihat, al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 1207. Dan sebagai perbandingan lihat buku-buku Ushul Fikih bab Istihsan.

²⁴ Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3.1 (2018): h. 20.

pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata siyasah berasal dari kata sasa. kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Objek Dan Klasifikasi Fiqh Siyasah

Objek studi fiqh siyasah, menurut Abdurrahman Taj, adalah seluruh perbuatan *mukhallaf* dan hal ihwal yang berkaitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan Negara, yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, kendatipun hal yang diatur itu tidak pernah disinggung baik dalam al-Quran maupun as-sunnah. Dengan kata lain, Objek studi fiqh siyasah adalah berbagai aspek perbuatan *mukhallaf* sebagai subyek hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *nash* syariat yang bersifat universal. Abdul Wahab Khallaf menyatakan, objek studi fiqh siyasah adalah berbagai peraturan dengan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur Negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

Mengenai pembagian fiqh siyasah di kalangan pakar fiqh siyasah terjadi perbedaan pendapat. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga bidang kajian Fiqh siyasah, yaitu²⁵ :

²⁵Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi al-Syu'un al-*
166

1. Siyasah Dusturiyyah;
2. Siyasah Maliyyah;
3. Siyasah Kharijiyyah;

Menurut Aburahman Taj mengklasifikasikan bidang kajian fiqh siyasah menjadi tujuh macam, yakni²⁶ :

1. Siyasah Dusturiyyah adalah bidang fiqh siyasah yang membahas undang-undang dasar suatu Negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga Negara.
2. Siyasah tasyri'iyah membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrument dalam mengatur dan mengelolah seluruh kepentingan masyarakat.
3. Siyasah Qadha'iyah secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatife.
4. Siyasah Maliyyah membahas sumber keuangan Negara dan tatyacara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan Negara.

5. Siyasah Idariyyah membahas tentang administrasi Negara.
6. Siyasah Tanfidziyyah membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif.
7. Siyasah Kharijiyyah membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri.

Pada hakekatnya Istihsan digunakan untuk mendapatkan kemashlatan dan menolak kemudharatan atau dengan kata lain digunakan untuk menemukan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemudlaratan yang lebih sedikit, sehingga Istihsan bisa dikatakan untuk digunakan sebagai sumber dan metode hukum Islam. Sebab Istihsan ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap nash-nash Syara' yang menunjukkan bahwa Allah SWT Yang Maha Bijaksana berpindah dari sebagian kasus-kasus yang bisa digunakan dengan Qiyas (umumnya nash) kepada hukum lain yang memberikan kemashlatan dan menolak kemafsadatan (kemudlaratan).

Istihsan bisa juga dikatakan sebagai dalil syara', akan tetapi bukan dalil yang Mustaqil, namun demikian ia harus kembali kepada dalil syara' yang lain sebab setelah diteliti tujuan pokok Istihsan itu tetap kembali kepada mencari kemaslahatan dan menolak

Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah. Bandingkan dengan Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islamiyyah*, h. 25, 26, dan 101.

²⁶Taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islamy*, h. 8.

kemadlaratan. Apabila Istihsan diartikan sebagai hal-hal yang dianggap baik oleh manusia sesuai dengan keinginan hawa nafsunya tanpa adanya dalil adalah bathil dan tidak bisa diterima.

Oleh karena itu Imam asy-Syaukani mengenai hal ini mengatakan bahwa orang yang mengambil Istihsan sebagai dalil tidaklah ia semata-mata mendasarkan pendapatnya kepada perasaan dan syahwatnya, tetapi ia kembali kepada apa yang ia ketahui tentang maksud syara' secara keseluruhan. Adapun Imam Syafi'i yang menolak tentang Istihsan dikarenakan berbeda pendapat/alasan yang beliau pakai/gunakan yaitu di antaranya : beliau mengatakan bahwa Istihsan tidak termasuk al-Kitab (al-Qur'an) atau asSunnah (al-Hadits) dan tidak pula merujuk kepada al-Kitab dan as-Sunnah, akan tetapi ia berada di luar itu semuanya, padahal syari'ah adalah sebuah nash dan kandungan nash (acuan kepada nash) yang melalui qiyas.

Salah satu metode istinbat hukum yang sangat relevan dengan pembaruan fiqh siyasah adalah istihsan. Karena istihsan sangat memperhatikan segi tujuan syariat yang hendak dicapai demi kepentingan umat. Sedangkan pembaruan pembaruan fiqh

siyasah berusaha untuk mengatur seluruh perbuatan hukum umat dengan ketentuan hukum perpolitikan yang islami. Dengan kata lain, istihsan disini bertujuan untuk menjamin kepentingan umat dengan mengatur seluruh perbuatan hukumnya dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan politik demi kebahagiaan hidup mereka dunia akhirat. Namun perlu dicatat bahwa pemakaian istihsan disaat ada masalah yang tidak ada ketentuannya dalam al-Quran dan al-hadis, sekalipun ada dalam qiyas tetapi hasilnya masih belum mewujudkan kemaslahatan umat atau berbenturan dengan maqashid al-syariah, maka dalam kondisi seperti ini mujtahid meninggalkan qiyas dan menggunakan istihsan.

Penutup

Istihsan selalu eksist dalam fiqh siyasah, karena istihsan adalah salah satu metode berpikir dalam menggali dalil-dalil untuk menentukan kepastian hukum yang belum tertulis dalam Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, istihsan bersifat responsif terhadap problematika kehidupan sosial, serta progresif, selaras dan seiring dengan fiqh siyasah yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Meskipun istihsan bergerak progresif seiring dengan kebudayaan masyarakat tetapi istihsan tidak akan

meninggalkan agama. Istihsan dapat berdiri di dalam agama karena istihsan berangkat bukan hanya dilandasi dengan nilai antroposentris saja melainkan juga dilandasi dengan nilai-nilai theosentris (nilai-nilai agama).

Pustaka Acuan

Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Kairo: Maktabat Da'wah al-Islamiyah, 1986)

Abdul Aziz Ibn 'Abdurrahman Ibn Ali al-Rabi'ah, *Adillat al-Tasyri' al-Mukhtalaf Fi al-Ihtijaj*, (t.t., Mu'assasat al-Risalah, Cet. I., 1399H/1979M)

Abdul Wahab Khalaf, *"Ilmu Ushul al-fikih* (Kairo: *Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah* , 1991), cet. VIII

Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Penerbit Risalah Bandung, 1985

Abu Zahrah, Lihat pula Manna' al-Qattan, Muhammad Sulaiman 'Abdullah al-Asyraf, al-wadhih Fi Ushul al-Fiqh Lil Muftadiin, (Amman: Dar al-Nafais), 1412H/1992 M)

Acep Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Bandung: Gilang Aditya Press, 1997)

Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam*

Syafi'i (Cet. I; Bandung: Mizan Media Utama, 2008)

Al Syatibi, *al I'tisham*, Libanon, Dar Al Maktabat al Ilmiyah , 1995 M/1415 H Juz. 2

AL-Imarah: *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018

Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz X, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adat, 1321H); Lihat pula, Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: LSIK, 1994)

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usûl al-Syari'ah*, Juz 4, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, t.th.)

Al-Taftazani, Ayarh al-Ta'wil 'Ala Tadwin, II, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, t.th.)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2009

Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Granada Press, 2007)

H. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

Hafizh, Mushlihin al," Biografi Al Syatibi", Hafizh, Mushlihin al,"Biografi Al Syatibi",www.rederensimakala

- h.com/2011/12/material-makalah-biografi-al-Syatibi_9165.html (13 Mei 2013)
- Hasan Hamid Hasan, *Nasabiyah al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islamiyah* (Mesir: Dâr alMaktabat al-Arabiyah, t.th.)
- Ibnu Ishaq al-Syatibi, *Al Muwafaqat Ushul al-Syari'ah*, Beirut; Dar Al-Kutub, tth Jilid 4
- Muhammad Abu Zahra, *Usûl al-Fiqh* (Kairo : Dâr al-Fikr al-Arabi, t.th.)
- Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa 'Ashruh Ara'uh wa Fiqhuh*, (t.t.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1366H/1974H)
- Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam : Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Al*
- Imam Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Diterjemahkan oleh : Shalahuddin Sabki dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Imam Asy Syafi'i, Penerjemah Masturi & Asmui Taman, *Ar Risalah Panduan Lengkap Fiqh dan Ushul Fiqh*, Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2019
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1994)
- Syathibi*), Penerbit Pustaka, Bandung tahun 1996, Cet. Ke-1
- Mukhtar Yahya, Fatrchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Penerbit PT. Al-Ma'arif Bandung. Tahun 1986
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), Jilid. II, cet. 14